

Cashless society: Tantangan dan Kesiapan Masyarakat di Kabupaten Fakfak**Muh. Fachruddin**

Politeknik Negeri Fakfak

Hasan Basri

Politeknik Negeri Fakfak

Muhammad Nur

Politeknik Negeri Fakfak

Alamat : Jalan TPA Imam Bonjol Atas, Desa Tanama, Kec. Pariwari, Kab. Fakfak
Prov. Papua BaratKorespondensi penulis: muh_fachruddin@polinef.id

Abstract. *The development of information and communication technology has significantly transformed the way people conduct financial transactions. One prominent shift is the transition from cash-based transactions to non-cash payment systems, commonly referred to as a cashless society. The core concept of a cashless society relies on transactions conducted through electronic payment instruments. This study aims to examine the challenges and readiness of the Fakfak Regency community in navigating the transition toward a cashless society. Using a qualitative approach, data were collected through surveys and in-depth interviews with various stakeholders, including the general public, local government, financial institutions, and local business actors. Most existing studies on cashless society predominantly focus on urban areas and regions with well-developed digital infrastructure. This research offers novelty by exploring the challenges and readiness of communities in Fakfak Regency, one of the 3T (frontier, outermost, and disadvantaged) regions in West Papua, characterized by limited digital infrastructure, low financial literacy, and a significant digital divide. Data analysis was carried out using the Technology Acceptance Model (TAM) to identify factors influencing the adoption of non-cash payment technologies. The findings indicate that the community in Fakfak Regency is not yet fully prepared for a cashless society. The region remains in the early stages of adopting non-cash transactions and faces various obstacles, including limited technological capability and insufficient infrastructure to support improvements in financial and digital literacy. This study provides important contributions by presenting an empirical picture of cashless adoption in a 3T region and offers valuable insights for developing more inclusive, adaptive, and contextually appropriate policies for the local transition toward a cashless society.*

Keywords: *Cashless, payment, technology***Latar Belakang**

Dampak dari Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi transaksi keuangan yang digunakan masyarakat. Perubahan yang paling terasa yaitu transisi dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai, yang

dikenal sebagai masyarakat tanpa uang tunai atau *Cashless society* (Ompusunggu & Poniman, 2023). Hal ini tercermin dalam peningkatan penggunaan kartu kredit, kartu debit, pembayaran digital, dan teknologi pembayaran elektronik lainnya (Ratu & Fasa, Meningkatkan Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah, 2022). Perubahan penggunaan perangkat digital yang tanpa disadari telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, seperti *Cashless society* peristiwa yang terjadi karena pesatnya pengaruh kecerdasan buatan dan Internet (Valeria, 2020).

Indonesia mempunyai program untuk penggunaan pembayaran non tunai atau *Gerakan Less Cash Society* (GLCS) melalui Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), yang digagas oleh Bank Indonesia tahun 2014 untuk mencapai Go Digital Vision 2020 (BI, 2020). Pembayaran elektronik mengalami peningkatan bukan hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga berdampak hingga daerah kecil (Tarantang, Awwaliyah, Astuti, & Munawaroh, 2019). Hal tersebut juga terjadi Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dimana masyarakat telah menggunakan pembayaran elektronik dalam bertransaksi keuangan seperti aplikasi Qris (*Quick Response Code Indonesia Standard*), Dana, Go-Pay, dan lainnya dengan alasan mendapat kemudahan, kenyamanan dan efisiensi (Fachruddin & Saputri, 2023). Berdasarkan data (Bank Indonesia, 2024),

Tabel 1. Jumlah merchant pengguna qris di papua barat

Kabupaten/kota	Tw 1	Tw 2	Tw 3
Raja ampat	52	93	147
Kota sorong	972	1.599	2.563
Tambrauw	4	4	7
Maybrat	18	52	68
Sorong selatan	23	42	98
Manokwari	930	1.326	1.824
Teluk bintuni	61	79	167
Pegunungan arfak	7	13	15
Manokwari selatan	4	6	13
Teluk wondama	28	37	69
Kaimana	26	55	149
Fakfak	41	133	398
Total	2.166	3.439	5.518

Sumber : Bank Indonesia, 2024

Pada Tabel. 1, menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak hingga Triwulan III Tahun 2024 terdapat 398 UMKM yang menggunakan pembayaran non tunai QRIS mengalami peningkatan dan mendorong penyebarluasan digitalisasi melalui penggunaan QRIS pada sektor UMKM. Papua Barat sedang berupaya untuk meningkatkan perluasan percepatan transaksi secara *cashless* seperti Qris, dengan membuat program agar masyarakat tertarik untuk menggunakan transaksi non tunai. Perbankan Daerah (BMPD) di wilayah kerja BI Provinsi Papua Barat, akan melakukan perluasan utilisasi Qris yang menasar di daerah-daerah potensial antara lain Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Fakfak yang memiliki potensi wisata serta menunjukkan pertumbuhan volume yang tumbuh signifikan hingga triwulan I 2024 (Bank Indonesia, 2024).

Pembayaran *cashless* semakin populer di Indonesia, menunjukkan pergeseran menuju masyarakat yang mengutamakan transaksi digital. Pergeseran ini didorong oleh semakin banyaknya metode pembayaran digital yang diterima pedagang atau UMKM terutama di sektor-sektor seperti makanan dan minuman (82%), pembelian di toko serba ada (81%), dan transaksi di supermarket (77%) (VISA, 2024). Selain UMKM, Instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Fakfak, telah melakukan upaya dalam rangka mendukung kebijakan meminimalkan penggunaan uang tunai (*Cashless society*) dan mendorong implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang bekerjasama Bank Mandiri dan Bank BRI (KPPN, 2024). UMKM yang tercatat aktif pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berjumlah 1.753 dari 5.942 UKM, kemudian 57 UMKM pada dinas Dinas Penanaman Modal terdapat 57 dari 388 UMKM tergolong *high risk*. Dari sekian UMKM terdapat 30 UMKM yang bergabung menjadi mitra pada aplikasi lokal dengan layanan jasa pesan antar di Kabupaten Fakfak (Fachruddin, Nur, & Basri, 2022), hal tersebut mengindikasikan pemasaran digital belum dilirik oleh pelaku UMKM. Rendahnya penggunaan internet untuk pemasaran digital mempunyai korelasi dengan tingkat literasi digital, dimana Papua dan Papua Barat termasuk kategori daerah dengan indeks kemiskinan digital yang tinggi (Fachruddin, Nur, & Basri, 2022).

Masalah atau kendala dalam implementasi penggunaan sistem pembayaran non tunai di Papua dan Papua Barat termasuk Kabupaten Fakfak meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi keuangan, preferensi masyarakat terhadap uang tunai, dan masalah keamanan serta privasi dalam penggunaan teknologi pembayaran elektronik (Fachruddin & Saputri, 2023) senada dengan penelitian (Valeria, 2020) dan (Febrinda & Ningsih, 2022). Selain itu, aspek kesiapan masyarakat dalam menerima dan mengadopsi

perubahan juga menjadi faktor penting dalam memahami transisi menuju masyarakat tanpa uang tunai (Ompusunggu & Poniman, 2023). Penelitian terkait dengan *cashless society* telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya, namun penelitian tersebut hanya fokus pada pulau Jawa atau kota-kota besar di wilayah Indonesia yang dilakukan (Dharma, 2023; Febrinda & Ningsih, 2022; Jam'an, 2020; Marlina, Mundzir, & Pratama, 2020; Ompusunggu & Poniman, 2023; Rahadi, et al., 2020; Ratu & Fasa, Meningkatkan Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah, 2022; Rif'ah, 2019; Valeria, 2020) dimana kemudahan atas akses digital dan infrastruktur telah memadai untuk melakukan pembayaran non tunai atau *cashless*. Sementara penelitian terkait *cashless society* di wilayah Papua Barat belum pernah dilakukan, terlebih pada kabupaten Fakfak secara khusus. Penelitian mengenai *cashless society* di Indonesia umumnya dilakukan pada wilayah dengan infrastruktur digital yang telah memadai, seperti pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya. Hasil-hasil penelitian sebelumnya cenderung menekankan kemudahan akses, kesiapan teknologi, dan persepsi positif terhadap layanan pembayaran digital. Namun, hingga kini, belum terdapat kajian yang secara khusus meneliti kesiapan masyarakat dalam mengadopsi pembayaran non-tunai di wilayah 3T seperti Papua Barat, terutama di Kabupaten Fakfak. Ketiadaan kajian empiris di daerah ini menciptakan *research gap* yang penting untuk diisi, mengingat percepatan digitalisasi tidak akan berjalan efektif tanpa memahami tantangan lokal yang unik.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka perlu dilakukan penelitian terkait tantangan dan kesiapan Masyarakat di Kabupaten Fakfak dalam menuju *cashless society*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan kesiapan adopsi teknologi pembayaran non-tunai di kalangan masyarakat Kabupaten Fakfak menuju *cashless society*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat menjawab pokok permasalahan dengan melakukan survei dan wawancara. Penelitian diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pembayaran non-tunai, serta menyediakan wawasan yang berharga bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis lokal, dalam merancang strategi untuk mendukung program Gerakan Nasional Non-Tunai menuju *cashless society* dan untuk meningkatkan perluasan percepatan transaksi secara *cashless* di Fakfak. Urgensi penelitian ini semakin kuat karena pemerintah daerah dan lembaga keuangan di Fakfak sedang mendorong digitalisasi layanan publik dan

peningkatan penggunaan pembayaran non-tunai, termasuk melalui implementasi QRIS dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Untuk memastikan keberhasilan program tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai tingkat penerimaan masyarakat, hambatan struktural, serta faktor-faktor yang memengaruhi adopsi cashless di Fakfak. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan kesiapan masyarakat Fakfak menuju masyarakat tanpa uang tunai, serta menyediakan dasar empiris bagi penyusunan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai konteks lokal.

KAJIAN TEORITIS

Cashless

Transaksi tanpa uang tunai atau *cashless payment* berlandaskan pada pemroses pembayaran barang maupun jasa dilakukan secara elektronik atau tanpa menggunakan uang tunai. *Cashless* adalah transaksi keuangan tidak lagi dengan penggunaan uang tunai termasuk uang logam (Marlina, Mundzir, & Pratama, 2020). Inovasi transaksi elektronik terjadi karena dampak dari perkembangan teknologi, dimana jual beli barang dan jasa dapat lakukan walau tanpa menggunakan uang tunai (Tee & Ong, 2016). Pembayaran secara *cashless* mengubah pemakaian uang menjadi alat transaksi yang dapat dilakukan melalui transfer elektronik (Ratu & Fasa, Meningkatkan Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah, 2022). Transaksi secara *cashless* dalam kehidupan bermasyarakat atau komunitas dapat diadaptasi dengan baik dengan mematuhi kebijakan Gerakan Nasional Non-Tunai, hasilnya pasti beragam sesuai kecepatan masyarakat bersedia menggunakan pembayaran secara *cashless* dengan mekanisme yang ada (Tee & Ong, 2016). Gerakan Nasional Non Tunai yang dibuat Bank Indonesia tanggal 14 Agustus 2014 adalah bentuk nyata sosialisasi dan edukasi dengan penggunaan transaksi secara *cashless* dalam kehidupan masyarakat agar mengenal dan mendapatkan kenyamanan dengan penggunaan uang non tunai dalam beraktivitas (BI, 2020).

Cashless society

Konsep utama *cashless society* didasarkan pada transaksi pada instrumen pembayaran elektronik (V. Jain and P. Jain, 2017). *Cashless society* tidak serta merta berarti tidak ada

transaksi tunai sama sekali dalam tatanan ekonomi, sebaliknya, jumlah transaksi berbasis uang sedang diminimalkan pada tingkat terendah. Masih sejalan dengan definisi sebelumnya, mendefinisikan *cashless society* sebagai suatu kondisi masyarakat, dimana sebagian besar transaksi dalam sistem ekonomi mereka tidak dilakukan untuk pertukaran dalam bentuk uang tunai aktual. Sejalan dengan maraknya penggunaan alat pembayaran elektronik di seluruh masyarakat, yang di sisi lain dapat disebut sebagai alat pembayaran non tunai, maka muncullah istilah yang disebut *cashless society*. *Cashless society* diartikan sebagai suatu komunitas dimana masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan alat pembayaran non tunai, khususnya untuk bertransaksi pada aktivitas jual beli barang atau jasa (Rahadi, et al., 2020).

Bagi perekonomian negara, *cashless society* menghasilkan perputaran uang yang lebih cepat dan ekonomi akan bertumbuh lebih baik (Fachruddin & Saputri, 2023). Terutama penggunaan transaksi sistem *online* dan *cashless*, yang memungkinkan setiap orang untuk membeli dan menjual barang tanpa batasan jarak dan waktu secara *real time*. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (UMKM) yang meningkat akan memiliki efek pada pertumbuhan GDP Indonesia. Secara teoretis, adopsi *cashless* dapat meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan, transparansi, serta mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi digital. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan teknologi masyarakat, serta literasi digital dan literasi keuangan. Pada wilayah 3T seperti Fakfak, faktor-faktor tersebut sering menjadi hambatan utama sehingga adopsi *cashless* tidak dapat disamaratakan dengan wilayah perkotaan.

Faktor Yang Mempengaruhi *Cashless society*

Beberapa faktor mendorong pandangan *cashless society*, yaitu: 1) Memiliki kesadaran akan munculnya kesempatan terjadinya *fraud* dan kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan uang tunai, misalnya pemalsuan uang tunai. 2). Kesadaran tentang transaksi keuangan dan perdagangan yang tidak selalu mengandalkan uang tunai akan membantu pemerintah mengatur dan melakukan pengawasan transaksi melalui akses ke laporan elektronik. 3). Transaksi tanpa uang tunai juga akan meminimalisir terjadinya korupsi dan kolusi terhadap berbagai pihak yang melakukan transaksi apalagi berhubungan dengan *public service* (Rif'ah, 2019). Menurut (Dharma, 2023), faktor yang mendorong *cashless society* adalah lebih higienis, dapat dibawa ke mana saja, transaksi dapat dilakukan kapan

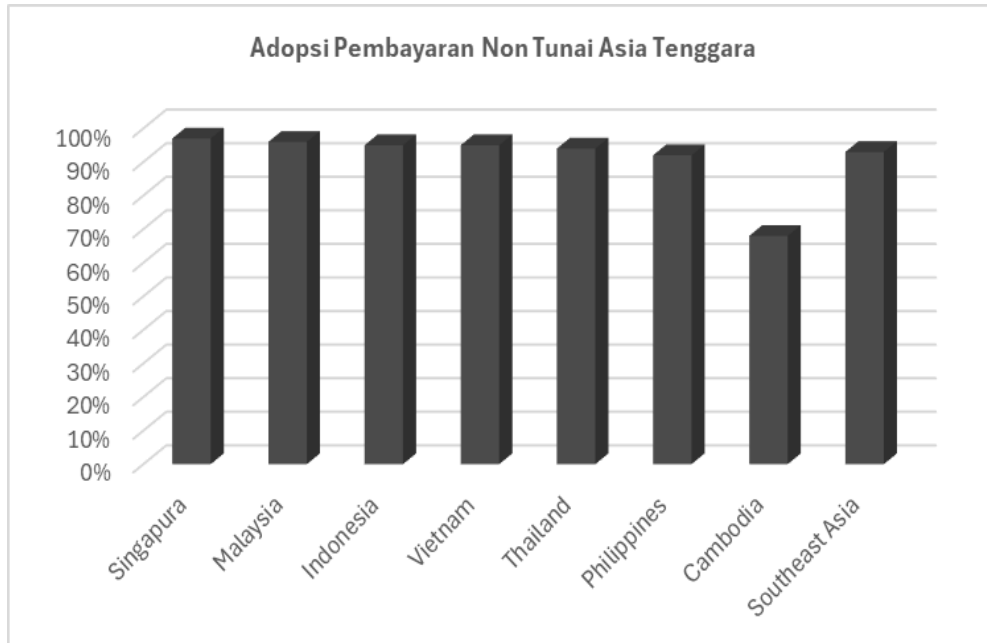
saja, aman dari pencurian, transaksi lebih mudah diatur, dan banyak promosi yang menggiurkan. Pada daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital, faktor-faktor ini sering berkembang secara tidak merata, sehingga menyebabkan kesenjangan penggunaan *cashless* seperti yang terlihat pada pelaku usaha di Fakfak.

Perkembangan *Cashless society* di Indonesia

Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), yang digagas oleh Bank Indonesia tahun 2014, telah meningkatkan penggunaan pembayaran non tunai di Indonesia. Untuk mencapai Go Digital Vision 2020, pemerintah juga mulai menggunakan metode pembayaran *cashless* di jalan tol sejak 2017. Pada dasarnya, pemerintah dan Bank Indonesia ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dengan mendorong penduduknya untuk secara bertahap menjadi masyarakat yang tidak menggunakan tunai. Tingkat preferensi orang Indonesia untuk pembayaran digital adalah yang kedua di Asia Tenggara, dengan 60%, hanya di bawah Singapura (79%). Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi uang elektronik pada September 2023 sebesar Rp 158,59 triliun, naik 0,5% dari bulan sebelumnya sebesar Rp 157,81 triliun.

Menurut survei tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 2., tingkat adopsi pembayaran non tunai di Asia Tenggara adalah 93%. Singapura memiliki tingkat adopsi tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 97%, sementara Indonesia 95%, sedangkan tingkat adopsi di Kamboja adalah 68 persen pada tahun 2021 (Statista, 2024). Seseorang harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi agar dapat mengakses uang yang tersimpan dalam dompet digital (*e-wallet*) atau aplikasi pembayaran elektronik untuk melakukan transaksi non-tunai. Namun, perbedaan fasilitas akses layanan digital masih sering terjadi di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan terhadap seseorang, rumah tangga, usaha, atau lokasi geografis tidak memiliki akses ke layanan jaringan digital atau internet untuk melakukan berbagai aktivitas, itu disebut "kesenjangan digital". Fenomena *cashless* menjadi lebih mungkin saat sektor ekonomi digital berkembang pesat. Namun, persentase pengguna internet terhadap populasi wilayah tertentu di Indonesia masih tidak mengalami perubahan di angka 25%, 80% pengguna internet terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera, menunjukkan penyebaran infrastruktur internet yang tidak merata, seperti halnya wilayah Papua dan Papua Barat seperti di Kabupaten Fakfak dimana kesiapan infrastruktur, kemampuan teknologi masyarakat, serta literasi digital dan literasi keuangan masih rendah. Sektor ekonomi dan

sosial mungkin mengalami konsekuensi lebih lanjut dari perbedaan ini, yang pada akhirnya akan menentukan tempat mereka dalam masyarakat. Untuk mewujudkan suatu masyarakat tanpa uang di Indonesia, diperlukan akses yang mudah ke teknologi dan tingkat pengetahuan digital yang tinggi akan dapat mengurangi eksklusi finansial di masa depan (BI, 2020).



Gambar 1. Grafik adopsi pembayaran non tunai asia tenggara
Sumber : Statista, 2024

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu teori penting tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dipakai untuk mendeskripsikan bagaimana seseorang menerima teknologi. *Technology Acceptance Model* pada awalnya dibuat menyesuaikan dari *Technology of Reason Action* (Davis, F. D., 1989). Model TAM berasumsi bahwa dasar untuk menemukan pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna ditentukan oleh proses kognitif, dan tujuan menggunakan teknologi adalah untuk memaksimalkan manfaat teknologi. Dengan kata lain, memahami manfaat teknologi informasi adalah faktor utama yang mendorong pengguna untuk menggunakannya (Jam'an, 2020). Perilaku seseorang dapat mempengaruhi keinginan untuk menerima kemajuan teknologi berdasarkan dengan tujuan yang ingin mereka dapatkan dengan mengadopsi teknologi. Jika teknologi yang digunakan belum memberikan sesuatu yang bernilai atau bermanfaat, berarti teknologi tersebut belum dapat dimaksimalkan dan dipakai dengan bijak. TAM terdiri dari lima struktur utama (Jam'an, 2020) yaitu:

a) Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of use*)

Indikator kemudahan penggunaan terdiri dari;

1. Mudah untuk dipelajari
2. Mudah untuk diatur, jelas, dan dipahami
3. Fleksibel
4. Mudah menjadi terampil
5. Mudah digunakan

b) Persepsi Kegunaan (*Perceived usefulness*)

Indikator kegunaan terdiri dari:

1. Pekerjaan menjadi lebih cepat
2. Bermanfaat
3. Produktivitas bertambah
4. Efektivitas semakin tinggi
5. Kinerja atas pekerjaan semakin berkembang

c) Sikap terhadap Penggunaan (*Attitude toward using*)

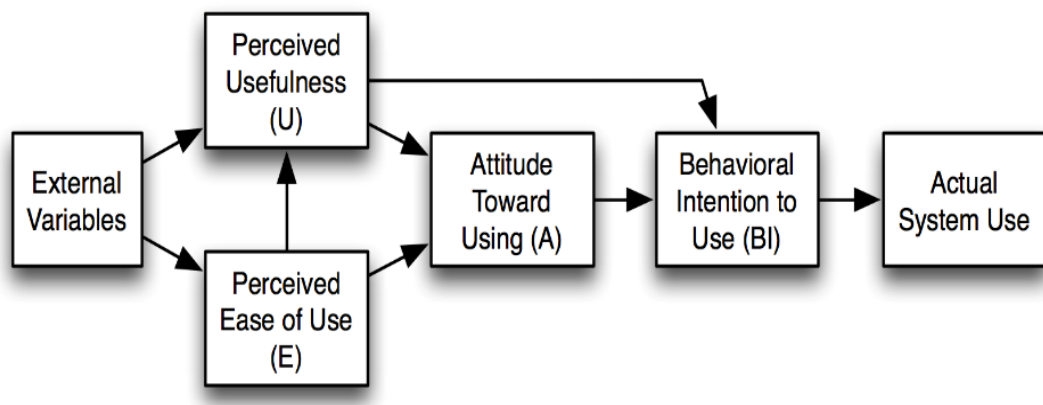
Dideskripsikan suatu perasaan positif atau negatif jika seseorang melakukan sesuatu yang telah ditentukan.

d) Minat Perilaku (*Behavioral Intention*)

Diartikan sebagai sebuah keinginan (minat) individu akan berperilaku tertentu jika memiliki suatu kemauan atau minat.

e) Penggunaan Aktual (*Actual Usage*)

Adalah perilaku nyata dalam menggunakan sistem, berdasar pada pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu menggunakan teknologi.



Gambar 2. *Technology acceptance model*

Sumber : Jam'an, 2020

Penerapan TAM dalam konteks Fakfak menjadi relevan karena tingkat kesiapan teknologi, literasi digital, dan akses infrastruktur di wilayah ini masih sangat bervariasi. Faktor-faktor tersebut memengaruhi:

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan: Sebagian pedagang dan masyarakat mengalami kesulitan menggunakan aplikasi pembayaran digital karena keterbatasan kemampuan teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil.
2. Persepsi Kegunaan: Meskipun banyak pelaku usaha modern merasakan manfaat seperti pencatatan keuangan otomatis dan keamanan transaksi, pedagang pasar tradisional belum melihat manfaat yang cukup besar, terutama untuk transaksi bernilai kecil.
3. Sikap dan niat menggunakan: Perbedaan persepsi antara masyarakat di wilayah pusat kota dan wilayah dengan akses terbatas menciptakan gap sikap terhadap penggunaan cashless.
4. Penggunaan aktual: UMKM di pusat perekonomian lebih cepat mengadopsi cashless dibandingkan pedagang di pasar tradisional, menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif agar keseluruhan makna dari permasalahan sosial yang ada dapat dipahami secara mendalam (Cresswell, J. C., 2014). Penelitian kualitatif memberikan peluang kepada peneliti agar mampu mengidentifikasi masalah dari perspektif partisipan penelitian dan memahami arti dan pandangan mereka terkait tindakan, peristiwa, atau objek (Cresswell, J. C., 2014). Pendekatan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Digunakan metode pengumpulan data baik data primer maupun sekunder seperti observasi, survei, wawancara, dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait pengalaman dalam menggunakan pembayaran non tunai. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu model interaktif (Sugiyono, 2012), yakni analisis data yang dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data pada waktu tertentu. Teknik analisis data tersebut adalah *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/Verification*. Untuk menguji

kredibilitas data dalam penelitian ini, tahap pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan memakai teknik triangulasi, yaitu mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh (Moleong, 2011). Untuk menguji kredibilitas penelitian kualitatif, pengujian kebenaran dan akurasi data harus dilakukan dengan menggunakan triangulasi, dimana triangulasi teknik dan sumber data digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengaitkan temuan lapangan dengan teori, analisis data diinterpretasikan melalui lima konstruk utama *Technology Acceptance Model* (TAM). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi di Fakfak, serta membantu membedakan perilaku adopsi antara wilayah dengan kesiapan digital yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari survei yang kami lakukan terhadap masyarakat terkait penggunaan pembayaran non tunai, Peneliti memperoleh responden dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria, masyarakat atau penduduk Fakfak, usia minimal 16 tahun dan pernah menggunakan pembayaran non tunai.

Tabel 2. Lama penggunaan pembayaran non tunai

Lama Penggunaan	Jumlah	%
1 Tahun	63	61
2 Tahun	11	11
3 Tahun	8	8
4 Tahun	4	4
5 Tahun	5	5
Lebih lima tahun	12	12
Total	103	100

Sumber : Peneliti

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden baru menggunakan pembayaran non-tunai kurang dari satu tahun (61%). Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi cashless di Fakfak berada pada tahap awal, sehingga pengguna masih membutuhkan pendampingan literasi digital. Jumlah responden yang ada dalam penelitian ini sebanyak 103 orang masyarakat dan melakukan wawancara dengan 43 pelaku UMKM.

Tabel 3. Aplikasi pembayaran yang paling sering digunakan

Aplikasi pembayaran yang digunakan	Jumlah	%
Dana	45	23
Qris	27	14
<i>Mobile banking</i>	54	27
<i>Shoope pay</i>	23	12
<i>Go pay</i>	19	10
Link aja	5	3
Ovo	8	4
Lainnya	16	8
Total	197	100

Sumber : Peneliti

Tabel 3 menunjukkan aplikasi pembayaran non-tunai yang paling sering digunakan oleh responden di Kabupaten Fakfak. Dari total 197 jawaban, mobile banking menjadi metode yang paling dominan digunakan (27%), diikuti oleh Dana (23%) dan QRIS (14%). Sementara aplikasi lain seperti Shopee Pay, GoPay, OVO, dan LinkAja digunakan dalam proporsi yang lebih kecil. Proporsi penggunaan ini memberikan beberapa gambaran penting. Pertama, dominannya penggunaan mobile banking menunjukkan bahwa masyarakat Fakfak lebih mengenal dengan layanan perbankan digital formal dibandingkan penggunaan dompet digital yang berbasis aplikasi. Kedua, penggunaan QRIS yang mencapai 14% menunjukkan adanya perkembangan awal dalam adopsi pembayaran berbasis kode QR, namun angkanya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Ketiga, beragamnya jenis aplikasi yang digunakan, tetapi dengan tingkat penggunaan yang bervariasi, mengindikasikan bahwa standar ekosistem cashless di Fakfak belum sepenuhnya terbentuk.

Untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam peneliti melakukan observasi pada daerah Kabupaten Fakfak, dari Distrik Pariwari dan Distrik Fakfak yang merupakan kawasan ekonomi (Januardi, 2024), yang dimana terdapat Pasar Torea, Pasar Kelapa dua, Pasar Kelapa dua yang merupakan pasar tradisional. Kemudian terdapat Pusat Pertokoan di Jl. Izak Telussa, Jalan Salasa Namudat atau Reklamasi Pantai yang banyak pelaku UMKM. Hanya saja untuk pasar tradisional pedagang masih enggan menerima pembayaran non tunai, pasar tumburuni hanya mendapat 1 pedagang makanan, 1 pedagang pulsa, dan 1 warung makan yang menggunakan sistem pembayaran non tunai. Pasar kelapa 2 yang menggunakan menerima pembayaran sistem non tunai hanya ada 2

toko atau konter *handphone*. Pasar Torea Fakfak sama sekali tidak ada pedagang yang menerima pembayaran non tunai hal tersebut dikarenakan kemampuan menggunakan teknologi pembayaran digital yang rendah.

Terdapat perbedaan hasil observasi dan wawancara dari pedagang pasar tradisional di Kabupaten Fakfak, pedagang atau pelaku usaha yang terletak diluar pasar tradisional pada distrik pariwari dan distrik Fakfak terhitung 101 tempat usaha berupa berupa swalayan, toko pakaian, toko peralatan rumah tangga, warung makan, restoran dan cafe yang telah menerima pembayaran dengan menggunakan non tunai atau *Cashless* dengan metode menggunakan Qris, mesin *electronic data capture* (edc) dan transfer menggunakan aplikasi *mobile banking*. Setelah melakukan survei, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pelaku UMKM yang dianggap mampu merepresentasikan tujuan penelitian. Hasil wawancara pada pedagang atau pelaku UMKM terkait tantangan dan kesiapan di Kabupaten Fakfak menuju *cashless society* dengan menggunakan pendekatan *technology acceptance model*. Analisis dilakukan dengan menyoroti perbedaan kondisi antara pelaku usaha di pusat ekonomi dan pedagang pasar tradisional, serta mempertimbangkan karakteristik wilayah Fakfak sebagai bagian dari daerah 3T yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi.

Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*)

Berdasarkan Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap pembayaran non-tunai mudah digunakan. Informan menyatakan bahwa aplikasi seperti mobile banking dan QRIS memberikan kemudahan dalam transaksi, terutama untuk pembayaran bernilai menengah hingga besar karena tidak memerlukan uang kembalian dan prosesnya lebih cepat. Namun, temuan observasi di pasar tradisional mengungkapkan kondisi yang berbeda. Pedagang tradisional masih mengalami hambatan dalam memahami cara mengoperasikan aplikasi, melakukan verifikasi transaksi, dan mengatasi kendala teknis seperti jaringan yang tidak stabil. Rendahnya literasi digital memperlambat proses adaptasi dan membuat sebagian pedagang merasa teknologi ini merepotkan dibandingkan uang tunai. Temuan ini mempertegas bahwa persepsi kemudahan penggunaan di Fakfak sangat dipengaruhi oleh akses infrastruktur dan kemampuan mengoperasikan perangkat, konsisten dengan prediksi TAM bahwa persepsi kemudahan merupakan faktor awal yang menentukan penerimaan teknologi.

Persepsi manfaat penggunaan (*perceived usefulness*)

Mayoritas pelaku UMKM modern dan masyarakat yang sudah rutin menggunakan pembayaran digital merasakan manfaat yang nyata, seperti efisiensi transaksi, keamanan lebih tinggi, dan pencatatan keuangan otomatis. Beberapa pedagang menyebut bahwa transaksi digital mengurangi risiko kehilangan uang tunai serta mempercepat proses layanan kepada pelanggan. Sebaliknya, pedagang di pasar tradisional cenderung belum melihat manfaat signifikan karena transaksi mereka didominasi oleh nilai kecil dan frekuensi tinggi, sehingga potongan biaya layanan dianggap merugikan. Selain itu, ketergantungan pada uang tunai masih kuat karena diyakini lebih pasti dan tidak bergantung pada jaringan. Perbedaan persepsi ini mencerminkan bahwa manfaat teknologi tidak dirasakan merata, terutama pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan literasi atau kebutuhan transaksi berbeda. Hal ini sesuai dengan TAM bahwa persepsi manfaat sangat menentukan apakah seseorang merasa teknologi tersebut benar-benar meningkatkan efektivitas kerja.

Sikap dalam menggunakan (*attitude toward using*)

Sikap masyarakat terhadap cashless secara umum positif, ditunjukkan oleh rasa nyaman, aman, dan puas terhadap layanan pembayaran digital. Hal ini diperkuat oleh meningkatnya penggunaan mobile banking, QRIS, dan dompet digital, terutama di pusat kota. Namun, sikap positif ini belum merata di seluruh segmen masyarakat. Pedagang di pasar tradisional masih menunjukkan sikap negatif terhadap pembayaran digital. Kekhawatiran terkait kesalahan transaksi, pencatatan yang membingungkan, dan risiko saldo tertahan membuat mereka belum sepenuhnya menerima teknologi non-tunai. Dengan demikian, sikap terhadap penggunaan di Fakfak dipengaruhi oleh kombinasi pengalaman pribadi, kemampuan teknologi, dan kondisi sosial-lingkungan, sejalan dengan asumsi TAM bahwa sikap terbentuk dari evaluasi kemudahan dan manfaat.

Keinginan untuk menggunakan (*behavioral intention to use*)

Sebagian besar responden yang telah menggunakan sistem pembayaran digital menunjukkan niat kuat untuk terus menggunakan layanan tersebut. Mereka menyatakan bahwa efisiensi, keamanan, dan kenyamanan menjadi alasan utama untuk mempertahankan penggunaan. Namun niat ini belum sepenuhnya muncul pada kelompok pedagang tradisional. Meskipun adanya dorongan dari pemerintah dan bank untuk menggunakan QRIS, minimnya pemahaman dan terbatasnya akses internet membuat niat

penggunaan tidak berkembang optimal. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan dukungan teknologi menjadi penentu utama dalam membentuk niat perilaku di Fakfak. Hal ini mengonfirmasi bahwa *behavioral intention* dipengaruhi kuat oleh konteks lokal, bukan hanya persepsi individu, sebagaimana diatur dalam model TAM.

Pemakaian aktual (*Actual use*)

Penggunaan aktual pembayaran non-tunai di Fakfak berada pada dua spektrum yang sangat berbeda. Di satu sisi, pelaku UMKM modern, karyawan, dan masyarakat di pusat kota sudah terbiasa menggunakan QRIS, mobile banking, dan e-wallet. Frekuensi penggunaan tinggi karena akses internet lebih baik dan transaksi lebih variatif. Di sisi lain, pedagang pasar tradisional hampir sepenuhnya masih menggunakan uang tunai. Minimnya perangkat teknologi, keterbatasan jaringan, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama penggunaan aktual di kelompok ini. Ketimpangan penggunaan aktual ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak hanya dipengaruhi faktor individu (seperti persepsi kemudahan atau manfaat), tetapi juga dipengaruhi kuat oleh faktor struktural, yaitu infrastruktur dan akses layanan digital yang belum merata di Kabupaten Fakfak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Fakfak masih berada pada tahap awal adopsi pembayaran non-tunai dan menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kemampuan teknologi serta minimnya dukungan infrastruktur untuk meningkatkan literasi finansial dan digital menuju *cashless society*. *Stakeholder* dapat melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital maupun literasi keuangan, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan dan Perguruan tinggi mempunyai peran dan dapat berkolaborasi sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Fakfak menuju *cashless society* hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Febrinda & Ningsih, 2022; Marlina, Mundzir, & Pratama, 2020; Iriani, Hidayah, Andjar, Zein, & Ridwan, 2024). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap kondisi riil adopsi cashless di daerah 3T dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan sesuai konteks lokal Fakfak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Mei 2024*. Papua Barat: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat.
- BI. (2020). *Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia*. From [bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx](https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx)
- Cresswell, J. C. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications, Inc.
- Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340,.
- Dharma, W. W. (2023). *Pengaruh Cashless Society Dan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Fachruddin, M., & Saputri, T. B. (2023, 12 2). Analisis Preferensi Penggunaan E-Payment Pada Konsumen Generasi Z di Kabupaten Fakfak. *Jurnal Informasi, Sains dan Teknologi*, 6(2), 93-103 .
- Fachruddin, M., Nur, M., & Basri, H. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakfak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Febrinda, R. R., & Ningsih, R. (2022). KESIAPAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI PASAR RAKYAT. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 87-100.
- Iriani, L. D., Hidayah, N., Andjar, F. J., Zein, E. M., & Ridwan, A. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Digital Pelaku UMKM Melalui Sosialisasi Sistem Pembayaran Non-Tunai di Kabupaten Sorong. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(2), 2815-2824.
- Jam'an. (2020, Juli). Penerapan Teori Technology Acceptance Model dalam Perilaku Pengguna Teknologi Internet (Studi Perilaku dalam Menerima Teknologi Internet) Universitas Muhammadiyah Makassar. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 3(2).
- Januardi. (2024, 01 30). *Kawasan Ekonomi Baru di Fakfak akan di Bangun Tahun 2025*. From [rri.co.id: https://www.rri.co.id/daerah/536485/kawasan-ekonomi-baru-di-fakfak-akan-di-bangun-tahun-2025](https://www.rri.co.id/daerah/536485/kawasan-ekonomi-baru-di-fakfak-akan-di-bangun-tahun-2025)
- KPPN. (2024). *KPPN Fakfak melaksanakan FGD Implementasi CMS dan KKP Satker bersama Bank Mandiri dan Bank BRI*. Fakfak: KPPN.
- Madubun, R. (2024, Juni 6). *BI Sebut UMKM Pengguna QRIS di Papua Barat, Papua Barat Daya Capai 79.548*. (papua dalam berita) Retrieved 11 3, 2024 from <https://papuadalamberita.com/bi-sebut-umkm-pengguna-qris-di-papua-barat-papua-barat-daya-capai-79-548/>
- Marlina, L., Mundzir, A., & Pratama, H. (2020, Desember 2). Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris. *Co-Management*, 3(2), 533-542.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ompusunggu, H., & Poniman. (2023). Dampak Cashless dan Cardless Society Bagi Kaum Milenial. *Seminar Nasional Ilmu dan Sosial & Teknologi*. Batam.
- Rahadi, R. A., Nainggolan, Y. A., Afgani, K. F., Yusliza, M. Y., Muhammad, Z., Angelina, C., & Farooq, K. (2020, June). Conceptual Model for Cashless Society: A Literature Synthesis. *European Journal of Business and Management Research*, 5(3).

- Ratu, I. K., & Fasa, M. I. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *Jurnal An-Nisbah: Perbankan Syariah*, 3(1), 63-82.
- Ratu, I. K., & Fasa, M. I. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63-82.
- Rif'ah, S. (2019). *Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam Lamongan*. Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.
- Statista. (2024, 11 9). *Cashless payments adoption rate in Southeast Asia in 2021, by country*. From <https://www.statista.com/statistics/1234061/sea-cashless-payments-adoption-rate-by-country/>
- Sugiyono. (2012). *Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). erkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60-75.
- Tee, H.-H., & Ong, H.-B. (2016). *Cashless payment and economic growth*. Tee and Ong Financial Innovation.
- V. Jain and P. Jain. (2017). "A Journey Towards A Cashless Society," in *Banking Sector In Oman: Strategic Issues*. Oman: Challenges And Future Scenarios.
- Valeria, F. (2020). "Cashless Society" di Indonesia : Risiko dan Tantangan. Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Center for Digital Society.
- VISA. (2024, 03 19). *Budaya Cashless Marak di Indonesia Seiring Penggunaan Uang Tunai yang Terus Menurun*. Retrieved 11 20, 2024 from <https://www.visa.co.id/about-visa/newsroom/press-releases/nr-id-240319.html>